



PUTUSAN
Nomor 1337/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

NAMA PENGUGAT, NIK NOMOR, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah, Lanjutan Tingkat Pertama Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal ALAMAT, selanjutnya **disebut Penggugat**.

Melawan;

NAMA TERGUGAT, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Pekerjaan Petani, Tempat tinggal ALAMAT, selanjutnya disebut Tergugat, selanjutnya disebut sebagai **"PENGUGAT"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah mendengar Saksi-saksi yang dihadirkan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang diajukan secara tertulis dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dalam register perkara Nomor 1337/Pdt.G/2024/PA.Pra tertanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujut, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR,



TERTANGGAL;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah terkadang di rumah Penggugat dan kadang di rumah Penggugat selama 5 tahun 5 bulan dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama NAMA ANAK usia 4 tahun; NAMA ANAK usia 1 tahun;
3. Bahwa sejak November 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat suka main judi On-Line (Slot);
 - Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang (sabu);
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November 2023 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Songgong, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Jero Bunut, Desa Teruwai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 1 (satu) tahun hingga sekarang;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

PUTUSAN 1337/Pdt.G/2024/PA.Pra 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang menghadap mewakili Penggugat di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Petugas Jurusita yang telah menyampaikan relaas panggilan sidang, telah menyampaikan relaas tersebut secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 1337/Pdt.G/2024/PA.Pra tertanggal 12 Desember 2024;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan mengupayakan perdamaian, membujuk serta menyampaikan penasihat di muka sidang agar Penggugat dapat kembali berfikir lebih dalam atas keputusan yang telah diambil serta mengupayakan kembalinya keharmonisan rumah tangga yang telah dibina;

Bahwa setelah penasihat tersebut disampaikan dan ternyata tidak berhasil, maka sesuai Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; *apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup*, kemudian ditutuplah persidangan untuk umum, dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatan perceraianya;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili, NOMOR, atas nama Penggugat, tertanggal 28 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

PUTUSAN 1337/Pdt.G/2024/PA.Pra 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, di paraf, diberi tanggal, alat bukti bertanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: NOMOR, atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 19 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, di paraf, diberi tanggal, alat bukti bertanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut;

Saksi I (Pertama):

NAMA SAKSI, tempat dan tanggal lahir songgong, 11 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Songgong, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Dengan ini menerangkan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan sebagaimana berikut ini;

- Bahwa Saksi merupakan Ibu Penggugat;
- Bahwa benar jika Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang dikaruniai 2 orang anak dan kini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar setahun yang lalu, disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab penuh atas pemenuhan nafkah dan kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa Tergugat menganggur, alias tidak punya pekerjaan tetap;
- Bahwa Saksi sebagai Ibu Penggugat, yang turut menafkahi dan memenuhi kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak setahun terakhir keduanya tidak pernah berkumpul dan bersama layaknya suami isteri;

Saksi II (Kedua):

NAMA SAKSI, tempat dan tanggal lahir songgong, 06 Agustus 1992,



agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Songgong, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Dengan ini menerangkan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan sebagaimana berikut ini;

- Bahwa Saksi merupakan Ibu Penggugat;
- Bahwa benar jika Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang dikaruniai 2 orang anak dan kini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar setahun yang lalu, disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab penuh atas pemenuhan nafkah dan kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa Tergugat menganggur, alias tidak punya pekerjaan tetap;
- Bahwa justru Ibu Penggugat yang turut menafkahi dan memenuhi kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak setahun terakhir keduanya tidak pernah berkumpul dan bersama layaknya suami isteri;

Bahwa Kuasa Penggugat mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulannya secara elektronik yang pada pokoknya agar talak satu *ba'in sughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa segala hal-ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, serta segala hal dalam perkara *a quo* merujuk kepada sebuah Berita Acara Sidang yang tidak terpisahkan dari hasil putusan ini, demikian Penggugat tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun kecuali memohon Putusan yang seadil-adilnya.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Diputus Verstek;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dan maksud dari Pasal 149 R.Bg ayat 1 bahwa; *Bila pada hari yang telah ditentukan*

PUTUSAN 1337/Pdt.G/2024/PA.Pra 5



Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila temyata menurut Pengadilan Negeri (Pengadilan Agama) itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan. Maka dari itu, tentang ketidakhadiran pihak Tergugat untuk membela kepentingannya dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap di muka persidangan sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, maka perkara ini dapat diputus oleh Pengadilan Agama Praya dengan Verstek, meskipun tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Upaya Damai;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka sidang, tetapi sebagaimana maksud dari pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 82 angka (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa; *selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan*, maka Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat, baik berupa penasihatn atau wejangan keagamaan yang sekiranya dapat menggugah hati nurani Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangga yang telah Penggugat dan Tergugat bina;

Tanpa Mediasi;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka ketentuan dari Pasal 4 Angka 2 huruf (b) dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; *sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut*, maka proses mediasi pada pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan termasuk dalam kategori pengecualian sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Kewenangan Absolut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, TERTANGGAL, dengan buku nikah tersebut dapat dipastikan bahwa pernikahan atau akad nikah Penggugat dilaksanakan secara akad Islam serta dinyatakan sebagai istri sah dari Tergugat, maka dengan ini Penggugat dinyatakan telah cukup bukti untuk mendapatkan *legal standing* guna mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Praya sebagaimana ketentuan personalitas keislaman/akad nikah para pihak berperkara yang tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 63 angka (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Kewenangan Relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Penggugat yang dikuatkan dengan SK Domisili Penggugat yang senyatanya berada di Kabupaten Lombok Tengah, merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan ini gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili, sebagaimana maksud Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya;

Gugatan Pokok Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tuntutan Penggugat berupa penjatuhan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana petitum Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap proses pemeriksaan gugatan Penggugat tersebut di atas yang tidak dihadiri oleh Tergugat, dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang pada persidangan yang



dimaksud, sehingga asas mendengar kedua belah pihak (*audiatur et altera pars*) di muka sidang tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka untuk menghindari adanya mufakat atau persekongkolan dalam suatu tindakan hukum yang mengandung tipu daya muslihat dan atau kepalsuan, maka dengan ini Penggugat sebagaimana dalil-dalil yang dituangkan dalam gugatannya di muka persidangan harus Penggugat buktikan sebagaimana kaidah umum yang berbunyi *البينة على المدعي*, adalah; *pembebanan pembuktian ditujukan kepada siapa yang mendalilkan*, dalam hal ini adalah Penggugat;

Pertimbangan Pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa KTP dan Kutipan Akta Nikah, masing-masing telah dilakukan pemeteraian dan cap pos (*nazegeleen*), maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt *juncto* serta Pasal 285 R.Bg tentang Akta Otentik, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat-surat tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil atas sebuah bukti persuratan dan dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang dan atas setiap keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg yang menyatakan bahwa; *tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi*, maka dengan ini kesaksian para saksi-saksi tersebut selanjutnya dinyatakan dapat diterima untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat secara bersesuaian menyampaikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak dapat menafkahi dan memenuhi



kebutuhan hajat hidup Penggugat beserta anak-anaknya, atau singkatnya masalah ekonomi yang menjadi sebab utama retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang demikian pula menyebabkan keduanya berpisah sejak setahun terakhir hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang, bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah sepenuhnya sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, maka Hakim harus memperhatikan secara khusus tentang kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain; *persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat dihubungkan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan*, maka dengan ini keterangan dari para saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat selanjutnya dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap serangkaian proses pemeriksaan perkara perceraian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Hakim menemukan beberapa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana berikut ini:

Fakta-fakta Hukum:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sah yang menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, TERTANGGAL, dan dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak yang kini dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak setahun terakhir, yang disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan dan nafkah Penggugat, yang kemudian menyulut perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan



Tergugat, hingga pada akhirnya keduanya berpisah sejak setahun terakhir dan tidak pernah tinggal dan berkumpul bersama lagi layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa **fakta hukum pertama** membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan diikat oleh sebuah ikatan suci, sakral dan kuat (ميثاقاً غليظاً) sehingga untuk melepaskan ikatan tersebut didasarkan pada pembuktian yang benar dan beralasan, atau fakta-fakta yang dianggap kritis atau diambang batas (dharuriyyah) yang kemudian dijadikan sebagai argumentasi pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa keharusan adanya alasan yang kuat untuk bercerai atau memutuskan tali pernikahan yang telah tersimpul kuat merupakan sebuah aturan luhur yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi;

عن تَوبَان قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya;

Dari Tsauban berkata, telah bersabda Rasulullah saw, istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa adanya alasan yang diperbolehkan maka haram baginya bau surga (HR. Bukhari dan Muslim).

Menimbang, bahwa hadis tersebut di atas telah sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa; *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*

Menimbang, bahwa **fakta hukum ke-II (dua)**, menunjukkan adanya perilaku atau perbuatan Tergugat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak-anaknya, maka dari itu, Majelis Hakim hendak mengetengahkan firman Allah swt dalam Surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi;

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ



Terjemahnya;

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para istri/ibu dari anak-anaknya dengan cara ma'ruf.

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis hakim hendak menegaskan kewajiban Tergugat selaku kepala rumah tangga terhadap pemenuhan nafkah, yang berakibat pada kebolehan Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan nafkah, demikian pendapat yang dikutip dari Kitab Bughyat al-Mustarsyidin (Dar al-fikr, th 1994, hal 398);

أنه لو تعذر تحصيل النفقة من الزوج ثلاثة أيام جاز لها الفسخ حضر الزوج أم غاب

Artinya;

Apabila pihak suami tidak dapat memenuhi nafkah atau kebutuhan rumah tangganya dalam masa 3 hari, maka pihak isteri dapat menuntut untuk memutuskan tali pernikahannya, baik suaminya dapat dihadirkan ataupun dalam keadaan gaib;

Menimbang, bahwa Pasal 80 KHI juga turut menegaskan tentang kewajiban suami selaku kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan istri, dalam Ayat (4) disebutkan; *sesuai dengan penghasilannya* **suami menanggung** : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak. Ayat (5); *Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai luhur dari sebuah perkawinan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 yang berbunyi; *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;*



Menimbang, bahwa demikian pula dengan kaidah dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yaitu: *"Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain"* merupakan kaidah yang sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas, sehingga alasan perceraian dapat terpenuhi sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU.No.16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah sekian lama berjalan tanpa adanya keharmonisan antara pasangan suami isteri, dan tidak ada lagi kepedulian antara satu dengan yang lainnya, dalam pandangan Majelis Hakim, kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak mendatangkan manfaat lagi bagi keduanya, yang terjadi bahkan sebaliknya, yaitu dapat mendatangkan kemudharatan, berdampak buruk pada mental atau psikis antara keduanya maupun dampak buruk akibat tekanan sosial, dalam hal ini nama baik keduanya dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyatakan, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami disharmonisasi, oleh karenanya telah mencukupi alasan yang kuat untuk dikabulkannya petitum Penggugat, sebagaimana dalam pokoknya; yaitu memutuskan tali pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009, maka biaya perkara perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku



serta hukum syariat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Agama Praya;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, 19 Desember 2024 Masehi bertepatan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, berdasarkan musyawarah majelis oleh **Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, yang didampingi oleh Hakim Anggota I **Ahyaril Nurin Gausia, S.H., M.H.** dan Hakim Anggota II **Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.**, bahwa Putusan tersebut dibacakan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi dan dibantu oleh **H. Husni Tamrin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ayaril Nurin Gausia, S.H., M.H.
Hakim Anggota II

Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti

PUTUSAN 1337/Pdt.G/2024/PA.Pra 13



H. Husni Tamrin, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 32.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. <u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 202.000,00

PUTUSAN 1337/Pdt.G/2024/PA.Pra 14